

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

Rai Devia Ayub¹
Made Suyana Utama²
I Gede Wardana³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email : rai.devia@yahoo.com

ABSTRAK

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Setelah dilakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan pihak eksternal maupun internal, terdapat kecenderungan peningkatan *trend* jumlah rekomendasi yang diberikan atas temuan hasil pemeriksaan. Rekomendasi diberikan oleh pemeriksa eksternal maupun internal dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan. Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP, dan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan data primer kuantitatif yang berbentuk asosiatif didukung dengan data sekunder. Teknik analisis berupa deskriptif dan persamaan struktural alternatif SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP dengan nilai *R-Square* sebesar 0,647. Selain itu, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance* dengan nilai *R-Square* sebesar 0,784.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *Good Governance*

ABSTRACT

The implementation of good governance is a prerequisite for the government in realizing the aspirations of the people and achieving the ideals of the nation and state. After a review of the external and internal audit results, there is a tendency to increase the number of recommendations given to the findings of the examination results. Recommendations are given by external and internal auditors in the framework of improvement and follow-up on the findings of examinations. This study analyzed the direct and indirect influence between the variables of Regional Financial Management, SPIP, SAKIP, and Good Governance in Bali Provincial Government by using primary data of quantitative in the form of associative supported by secondary data. Analytical techniques are descriptive and alternative structural equations of SEM PLS. The results showed that the variable of Regional Financial Management and SPIP have a positive and significant effect on SAKIP with R-Square value of 0.647. In addition, the variables of Regional Financial Management, SPIP, SAKIP also have a positive and significant effect on Good Governance with R-Square value of 0.784.

Keywords: Regional Financial Management, Government Internal Control System, Government Institution Performance Accountability System, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau mungkin tidak diimplementasikan, dikenal dengan istilah *governance*. Analisis mengenai *governance* berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah merupakan salah satu aktor tersebut. Pemerintah, yang dulunya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat maupun lambat harus merasakan pergeseran peran dari posisi mengatur bahkan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Istilah *good governance* adalah wacana yang mengiringi gerakan reformasi. Wacana *good governance* sering dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan adalah syarat pelaksanaan *good governance*. Dengan memberi kesempatan pada masyarakat mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, akan mempermudah masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat dengan mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya. Di samping itu, hak asasi dari semua warga negara adalah memperoleh informasi agar dapat melaksanakan penilaian pada kinerja pemerintah dengan tepat.

Transparansi juga mempunyai keterkaitan dengan akuntabilitas. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya bisa dilihat dari sistem birokrasi pemerintah yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan ataupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Cermin asas demokrasi suatu negara adalah partisipasi masyarakatnya dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Selamat, 2011: 2).

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2000, terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara (LAN dan BPKP, 2000: 3). Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wujud pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mampu mendorong terwujudnya *good governance* dan bermanfaat

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel hingga mampu memperlihatkan akuntabilitas publik (Andriani, 2015: 58).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Bab X Pasal 58 Ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja diselenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pengendalian intern memiliki pengaruh bagi kinerja pemerintah daerah serta menolong anggota organisasi untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan efektif untuk meraih kinerja yang semakin baik. Pengawasan intern mengawasi apakah perilaku organisasi telah berfokus pada pencapaian kinerja yang baik dan melakukan perbaikan atas perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang ditetapkan. Pengendalian internal mendukung responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Pengawasan intern bertujuan membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja yang efektif. Semakin bagus pelaksanaan pengawasan intern akan memberikan dampak semakin bagus pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Wulansari, 2014: 119). Pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance*. Semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada setiap perangkat daerah, maka semakin tinggi pula terciptanya prinsip-prinsip *good governance* (Yusniar, 2016: 110).

Menurut Almanda Primadona (2011: 4) untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik perlu dilaksanakan pengukuran kinerja. Akuntabilitas tidak hanya kemampuan

memperlihatkan bagaimana membelanjakan uang publik secara ekonomis, efektif, serta efisien. Setiap perangkat daerah yang selaku pengguna anggaran akan menghasilkan kinerja yang berbeda sesuai dengan tugas tanggungjawab dan kemampuan yang dimiliki. Semakin baik tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin baik tingkat kinerja pemerintah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai dengan baik juga, karena semua komponen organisasi bergerak bersama-sama menjalankan program kegiatan secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian akan mendukung peningkatan kinerja dan penerapan SAKIP (Ratna, 2016: 75). Sebuah organisasi bisa dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* bila pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan (Ristansi, 2014: 9).

Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 telah menetapkan visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu Bali yang maju, aman, damai, serta sejahtera (Bali Mandara). Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi Bali Mandara di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Pemerintah Provinsi

Bali Tahun 2013-2018. Salah satu sasaran yang akan dicapai pada tujuan misi ini diantaranya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang digunakan yaitu mengintensifkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di tengah ramainya isu *good governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pada Pemerintah Provinsi Bali saat ini muncul suatu fenomena. Setelah dilakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan pihak eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun maupun hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terdapat kecenderungan peningkatan *trend* jumlah rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi diberikan oleh pemeriksa eksternal maupun internal dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, baik berupa temuan administrasi maupun temuan keuangan daerah akibat dari kelalaian dan tindakan penyelewengan oleh aparatur. Hal ini dikhawatirkan menjadi pemicu ketidakpercayaan publik pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun datanya sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan
Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2012-2015

No	Tahun	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi
1	2	3	4
1	2012	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
		Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	33
		Pemeriksaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8
		Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	327
		Jumlah	393
2	2013	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah	34

No	Tahun	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi
1	2	3	4
		Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	346
		Jumlah	428
3	2014	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43
		Pemeriksaan Manajemen Aset	27
		Pemeriksaan Belanja Daerah	31
		Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	370
		Jumlah	471
4	2015	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua	22
		Pemeriksaan Pendapatan Daerah	29
		Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	556
		Jumlah	642

Sumber : Inspektorat Provinsi Bali, 2017, data diolah

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas serta peningkatan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal maupun internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Bali, maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* pada Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Bali? 2) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *good governance* pada Pemerintah Provinsi Bali? 3) Bagaimana pengaruh tidak langsung pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *good governance* melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Bali?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan SPIP terhadap SAKIP pada Pemerintah Provinsi Bali, menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP terhadap *good governance* pada Pemerintah Provinsi Bali, dan menganalisis bagaimana pengaruh tidak langsung pengelolaan keuangan daerah dan SPIP terhadap *good governance* melalui SAKIP pada Pemerintah Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali. Populasi penelitian ini yaitu pejabat pengelola keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pejabat pengelola keuangan daerah yang terkait langsung dan pengambilan sampel dilakukan pada perangkat daerah yang tidak baru terbentuk. Jumlah sampel adalah sebanyak 96 sampel.

Variabel pengelolaan keuangan daerah dan SPIP dalam penelitian ini merupakan variabel eksogen. SAKIP merupakan variabel antara karena berfungsi ganda yaitu sebagai variabel independen dan sebagai variabel dependen pada hubungan lain. Variabel *good governance* merupakan variabel endogen.

Definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

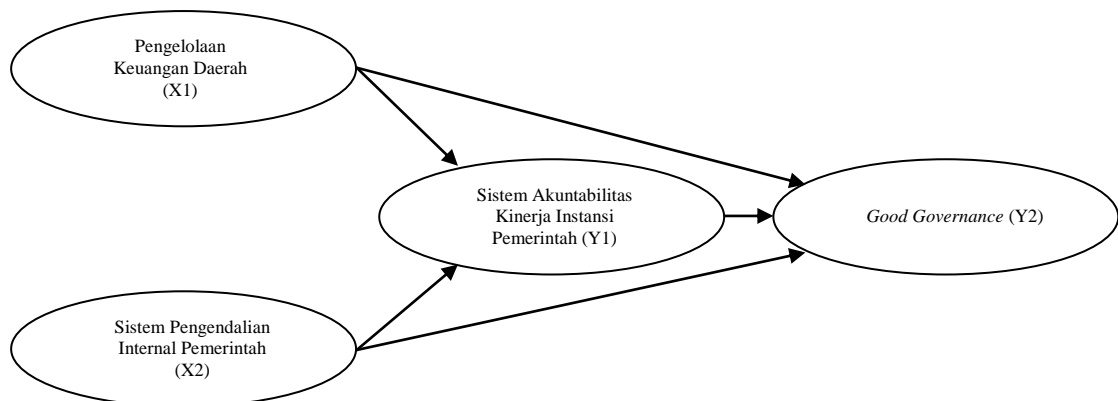
- 1) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Variabel ini menggunakan indikator berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang juga digunakan saat

- penelitian oleh Yusmalizar (2014: 11) yaitu: kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah, ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, kelengkapan pelaporan dan pertanggungjawaban, dan efektivitas pengawasan.
- 2) SPIP adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Variabel ini menggunakan indikator berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang juga digunakan saat penelitian oleh Ni Made Sudiarianti (2015: 55) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
 - 3) SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Variabel ini menggunakan indikator berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 yang juga digunakan saat penelitian oleh Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah (2016: 62) yaitu: kualitas perencanaan kinerja, kualitas pengukuran kinerja, penyajian pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
 - 4) *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi

antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Indikator yang digunakan berdasarkan modul Akuntabilitas dan *Good Governance*, yang juga digunakan saat penelitian oleh Elvira Zeyn (2010: 58) yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif antara lain pengelolaan keuangan daerah, SPIP, SAKIP, dan *good governance* yang diukur menggunakan skala likert. Data kualitatif antara lain penjelasan yang relevan tentang karakteristik lokasi serta permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam hasil pemeriksaan pihak eksternal dan internal. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan kuisisioner penelitian.

Partial Least Square (PLS) component based Structural Equation Model (SEM) merupakan teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel yang diamati dalam penelitian ini. Model SEM adalah teknik statistik yang memungkinkan pengujian rangkaian hubungan yang kompleks secara simultan serta berjenjang. Dalam SEM kemungkinan variabelnya merupakan indikator tunggal atau merupakan variabel laten yang terbentuk dari beberapa indikator serta bisa juga ditemui variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen dan juga menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris dapat dibuat hubungan antar variabel pada Gambar 1.



Gambar 1
Model Analisis Jalur

Dalam teknik PLS hubungan antar variabel dispesifikasikan menjadi: *outer model*, *inner model*, serta pengaruh tidak langsung yang dijelaskan di bawah ini:

1) *Outer model*

Outer model atau *measurement model* adalah model pengukuran hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Dalam Gambar 2.1, terdapat empat model pengukuran yang semuanya merupakan indikator reflektif, yaitu: pengelolaan keuangan daerah, SPIP, SAKIP, dan *good governance*.

Evaluasi *outer model* dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- (1) *Convergent Validity* (CV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat korelasi atau loading antara variabel terukur dengan variabel latennya.
- (2) *Discriminant Validity* (DV) pada indikator reflektif yaitu dengan melihat *crossloading* terhadap konstruk atau latennya.

(3) *Composite Reliability* (ρ_c) digunakan untuk indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk, di samping *Cronbach Alpha* yang sering digunakan.

2) *Inner model*

Dalam PLS *inner model* menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaan sesuai dengan Gambar 2.1 adalah:

$$Y1 = \beta1 X1 + \beta2 X2 + \epsilon1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \beta3 X1 + \beta4 X2 + \beta5 Y1 + \epsilon2 \quad \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

X1 = Pengelolaan Keuangan Daerah

X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Y1 = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Y2 = *Good Governance*

$\beta1, \beta2, \dots, \beta5$ = koefisien jalur

$\epsilon1, \epsilon2$ = *inner residual*

Evaluasi atas *inner model* dilakukan dengan menilai besar koefisien jalur strukturalnya serta nilai uji t statistik yang didapat melalui metode *bootstrapping*. Selain itu juga dilihat nilai R^2 variabel laten dependen. Selain R^2 model PLS juga dapat dievaluasi *predictive prevelance* melalui *Stone-Geiser Q Square test* (Ghozali, 2011).

3) Pengaruh tidak langsung

Untuk mengetahui ada atau tidaknya peran variabel antara atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, PLS akan otomatis mengeluarkan hasilnya melalui *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dapat dijelaskan karakteristik pengelola keuangan. Karakteristik pengelola keuangan dilihat dari demografi pengelola keuangan. Demografi tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pengelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Bali. Demografi pengelola keuangan penelitian ini meliputi: jenis kelamin, umur, pendidikan, dan masa kerja.

Responden didominasi oleh pengelola keuangan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 51% sedangkan pengelola keuangan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 49%. Hal ini membuktikan bahwa pada Pemerintah Provinsi Bali dalam penunjukan pejabat pengelola keuangan didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Demografi responden berdasarkan umur lebih didominasi oleh responden yang berumur 56 sampai 60 tahun yaitu sebesar 38% dimana dalam jangka waktu yang tidak lama responden tersebut akan memasuki masa purna tugas atau pension. Untuk jenjang pendidikan responden (pengelola keuangan) Organisasi Perangkat Daerah diketahui bahwa sebanyak 53% pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah memiliki jenjang pendidikan S2, sebanyak 36% memiliki jenjang pendidikan S1/D4, sebanyak 3% memiliki jenjang pendidikan Diploma, dan sisanya sebesar 8% memiliki jenjang pendidikan SLTA. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Bali didominasi oleh responden yang memiliki masa kerja 31 sampai 35 tahun yaitu sebesar 33%.

Persepsi responden atas variabel pengelolaan keuangan daerah (X1) terkonsentrasi pada skor 4 dan 5 dimana keseluruhan mempunyai rata-rata skor 4,33. Hal tersebut berarti pengelolaan keuangan daerah berada pada tingkat sangat baik. Namun demikian ada indikator yang rata-rata skornya masih berada di bawah rata-rata yaitu indikator ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan (X1.2) dengan rata-rata skor 4,24. Indikator yang memiliki rata-rata skor paling tinggi yaitu kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah (X1.1) dengan rata-rata skor 4,39 dan paling rendah yaitu ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan (X1.2) dengan rata-rata skor 4,24.

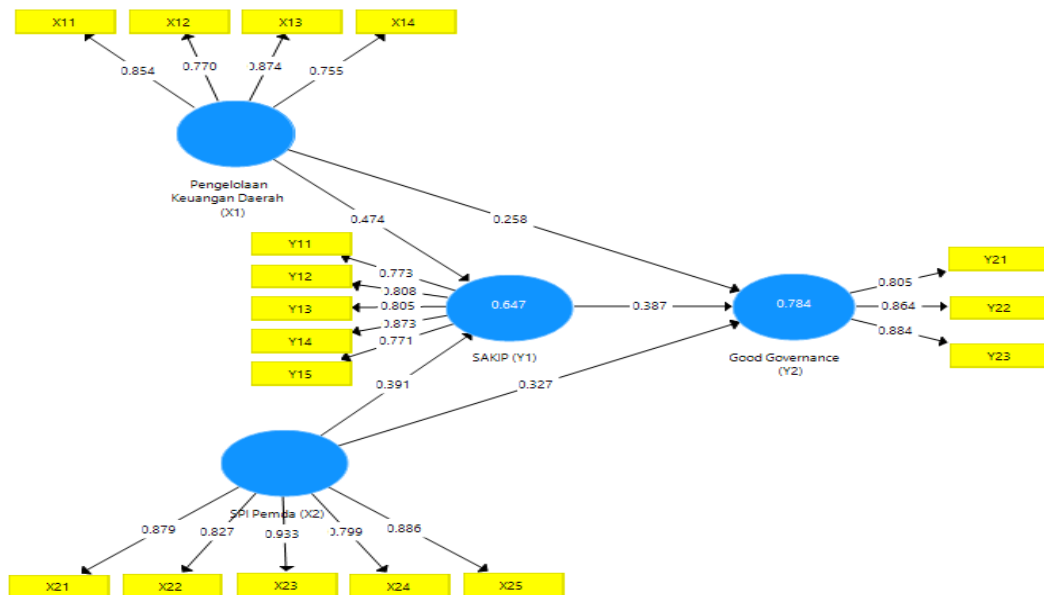
Persepsi responden atas variabel SPIP (X2) terkonsentrasi pada skor 4 dan 5 dimana secara keseluruhan mempunyai rata-rata skor 4,20. Hal ini berarti bahwa SPIP berada pada tingkat sangat baik. Namun demikian ada indikator yang rata-rata skornya masih berada di bawah rata-rata yaitu indikator lingkungan pengendalian (X2.1) dengan rata-rata skor 4,15 dan penilaian risiko (X2.2) dengan rata-rata skor 4,15. Indikator yang memiliki rata-rata skor paling tinggi yaitu pemantauan (X2.5) dengan rata-rata skor 4,26 dan paling rendah yaitu lingkungan pengendalian (X2.1) dan penilaian risiko (X2.2) dengan rata-rata skor masing-masing 4,15.

Persepsi responden atas variabel SAKIP (Y1) terkonsentrasi pada skor 4 dan 5 dimana keseluruhan mempunyai rata-rata skor 4,24. Hal ini berarti bahwa SAKIP berada pada tingkat sangat baik. Namun demikian ada indikator yang rata-rata skornya masih berada di bawah rata-rata yaitu indikator kualitas pengukuran kinerja (Y1.2) dengan rata-rata skor 4,18 dan capaian kinerja (Y1.5) dengan rata-rata skor 4,11. Indikator yang memiliki rata-rata skor paling tinggi yaitu

evaluasi kinerja (Y1.4) dengan rata-ran skor 4,34 dan paling rendah yaitu capaian kinerja (Y1.5) dengan rata-ran skor 4,11.

Persepsi responden atas variabel *good governance* (Y2) terkonsentrasi pada skor nilai 4 dan 5 dimana secara keseluruhan mempunyai rata-ran skor 4,10. Hal ini berarti bahwa *good governance* berada pada tingkat baik. Namun demikian ada indikator yang rata-ran skornya masih berada di bawah rata-rata yaitu indikator partisipasi (Y2.2) dengan rata-ran skor 3,85. Indikator yang memiliki rata-ran skor paling tinggi yaitu transparansi (Y2.1) dengan rata-ran skor 4,25 dan paling rendah yaitu partisipasi (Y2.2) dengan rata-ran skor 3,85.

Dalam analisis dengan metode PLS terdapat dua hal yang dilakukan. Pertama, menilai *outer model* atau *measurement model* yang merupakan penilaian atas reliabilitas serta validitas variabel penelitian dengan kriteria *outer model* yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Kedua, menilai *inner model* atau *structural model*. Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, serta *R-square* dari model penelitian. Penelitian ini menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* pada Pemerintah Provinsi Bali dengan SAKIP sebagai variabel mediasi. Secara keseluruhan *full model* sesuai hasil perhitungan *Partial Least Square* bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Full Model dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali

1) Evaluasi *Outer Model* atau *Measurement Model*

Berdasarkan hasil perhitungan *convergent validity*, semua indikator yang membentuk konstruk pengelolaan keuangan daerah (X1), SPIP (X2), SAKIP (Y1), dan *good governance* (Y2) secara statistik signifikan dengan nilai *p value* sebesar 0,000 t hitung lebih besar dari 1,96. Nilai *loading* semuanya di atas 0,5 berarti bahwa konstruk yang dibuat sudah memenuhi syarat *convergent validity*.

Tabel 3.1 menyajikan hasil output PLS mengenai *convergent validity*.

Tabel 2
Outer Loading Indikator Terhadap Konstruk Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), SPIP (X2), SAKIP (Y1), dan Good Governance (Y2) Pemerintah Provinsi Bali

Hubungan Antar Variabel	Loading	Standar Deviation	T Statistics	P Values
1	2	3	4	5
X1.1 ← X1	0,854	0,028	31,037	0,000
X1.2 ← X1	0,770	0,056	13,627	0,000
X1.3 ← X1	0,874	0,021	41,713	0,000
X1.4 ← X1	0,755	0,052	14,423	0,000

Hubungan Antar Variabel	<i>Loading</i>	<i>Standar Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
1	2	3	4	5
X2.1 ← X2	0,879	0,036	24,660	0,000
X2.2 ← X2	0,827	0,043	19,327	0,000
X2.3 ← X2	0,933	0,013	71,741	0,000
X2.4 ← X2	0,799	0,041	19,712	0,000
X2.5 ← X2	0,886	0,021	42,987	0,000
Y1.1 ← Y1	0,773	0,053	14,636	0,000
Y1.2 ← Y1	0,808	0,040	20,116	0,000
Y1.3 ← Y1	0,805	0,043	18,567	0,000
Y1.4 ← Y1	0,873	0,022	39,474	0,000
Y1.5 ← Y1	0,771	0,059	13,048	0,000
Y2.1 ← Y2	0,805	0,034	23,631	0,000
Y2.2 ← Y2	0,864	0,026	32,638	0,000
Y2.3 ← Y2	0,884	0,022	39,355	0,000

Sumber : Data primer (2017)

Validitas konstruk dapat dinilai dari *Discriminan Validity* (DV) pada indikator reflektif yaitu dengan cara membandingkan *Cross Loading* indikator terhadap konstruk atau latennya. *Discriminant Validity* (DV) baik apabila indikator memiliki *Cross Loading* pada konstraknya lebih besar dibanding dengan konstruk lainnya.

Tabel 3
Cross Loading Indikator Terhadap Konstruk
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), SPIP (X2), SAKIP (Y1), dan Good
Governance (Y2) Pemerintah Provinsi Bali

Konstruk	Indi- kator	Pengelolaan	SPIP	SAKIP	Good Governance
		Keuangan Daerah (X1)			
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	X1.1	0,853	0,695	0,651	0,737
	X1.2	0,772	0,481	0,522	0,616
	X1.3	0,871	0,704	0,744	0,799
	X1.4	0,758	0,640	0,514	0,636
	X1.5	0,758	0,640	0,514	0,636
SPIP (X2)	X2.1	0,705	0,882	0,758	0,798
	X2.2	0,505	0,820	0,581	0,623
	X2.3	0,762	0,932	0,807	0,842
	X2.4	0,689	0,804	0,663	0,763
	X2.5	0,681	0,885	0,761	0,792
SAKIP (Y1)	Y1.1	0,584	0,657	0,777	0,705
	Y1.2	0,640	0,662	0,806	0,729
	Y1.3	0,607	0,597	0,799	0,653
	Y1.4	0,674	0,729	0,868	0,771
	Y1.5	0,540	0,700	0,779	0,713

Konstruk	Indikator	Pengelolaan Keuangan Daerah	SPIP	SAKIP	Good Governance
		(X1)	(X2)	(Y1)	(Y2)
1	2	3	4	5	6
Good Governance (Y2)	Y2.1	0,751	0,718	0,726	0,814
	Y2.2	0,693	0,752	0,716	0,860
	Y2.3	0,757	0,796	0,821	0,881

Sumber : Data primer (2017)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa *Discriminant Validity (DV)* telah terpenuhi dan *Cross Loading* juga telah terpenuhi dengan baik. Indikatornya memiliki *Cross Loading* lebih besar dari pada konstruk lainnya.

Selain dilihat dari DV, kelayakan konstruk yang dibuat bisa juga dilihat melalui *Average Variance Extracted (AVE)*, *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability*. Secara umum indikator ini dipergunakan untuk indikator reflektif yang bermanfaat mengukur konsistensi internal suatu konstruk.

Tabel 4
Average Variance Extracted (AVE), Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Konstruk Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), SPIP (X2), SAKIP (Y1), dan Good Governance (Y2) Pemerintah Provinsi Bali

Variabel / Konstruk	Average Variance Extracted	Akar AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
1	2	3	4	5
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0,664	0,815	0,887	0,831
SPIP (X2)	0,750	0,866	0,937	0,916
SAKIP (Y1)	0,650	0,806	0,903	0,865
Good Governance (Y2)	0,726	0,852	0,888	0,811

Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa konstruk pengelolaan keuangan daerah (X1), SPIP (X2), SAKIP (Y1), dan *good governance* (Y2) Pemerintah Provinsi Bali sangat baik karena memiliki *Discriminant Validity (DV)* yang lebih besar dari 0,5 dimana *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,6.

2) Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *R-Square* dilakukan untuk memberikan penjelasan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu menjelaskan variabel endogennya. Hasil pengujian *Inner Model* dapat melihat hubungan antar konstruk dengan cara membandingkan nilai signifikansi dan *R-Square* dari model penelitian (Ghozali, 2011). Nilai *R-Square* dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu $0,00 - 0,19 =$ lemah; $0,19 - 0,67 =$ moderat; dan $0,67 - 1,00 =$ kuat.

Tabel 5
Nilai *R-Square*

No 1	Variabel Dependen 2	<i>R-Square</i> 3	Keterangan
1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y1)	0,647	Moderat
2	<i>Good Governance</i> (Y2)	0,784	Kuat

Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan seperti terlihat pada Tabel 5 dapat dinyatakan nilai *R-Square* variabel SAKIP (Y1) sebesar 0,647. Angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 64,7% variabel SAKIP dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan daerah dan SPIP, sedangkan 35,3% variabel SAKIP dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dalam hal ini, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah moderat. Demikian juga variabel *good governance* memiliki nilai *R-Square* yaitu 0,784. Angka tersebut memiliki interpretasi bahwa 78,4% variabel *good governance* dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP, sedangkan 21,6% variabel *good governance* dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dalam hal ini, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah kuat.

Selain menggunakan *R-Square*, *Goodness of Fit Model* juga diukur menggunakan *Q-Square Predictive Relevance* untuk model struktural yang mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Perhitungan *Goodness of Fit Model* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \\
 &= 1 - (1 - (0,647)^2) (1 - (0,784)^2) \\
 &= 0,776
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, 77,6% variabel *Good Governance* dijelaskan oleh variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sedangkan sisanya sebesar 22,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian seperti misalnya variabel pemberdayaan sumber daya manusia (Harahap, 2012). Dengan demikian model yang dibangun mempunyai nilai *Predictive Relevance* atau tingkat prediksi yang cukup akurat.

3) Uji Pengaruh Langsung

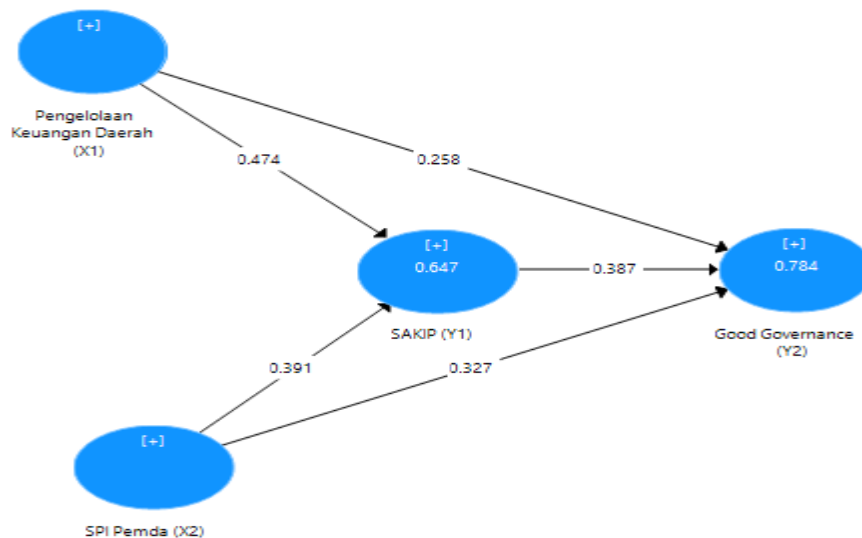
Pengujian *path coefficients* dilakukan untuk menguji pengaruh variabel dalam model sebagaimana tertuang pada Tabel 6.

Tabel 6
Result for Inner Model (Pengaruh Langsung)

No	Pengaruh Langsung	Original Sample	Standard Deviation	T Statistics	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Keuangan Daerah → SAKIP	0,474	0,119	3,973	Signifikan
2	SPIP → SAKIP	0,391	0,131	2,979	Signifikan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah → <i>Good Governance</i>	0,258	0,093	2,770	Signifikan
4	SPIP → <i>Good Governance</i>	0,327	0,154	2,119	Signifikan
5	SAKIP → <i>Good Governance</i>	0,387	0,104	3,703	Signifikan

Sumber: Data primer (2017)

Dari hasil pengujian hipotesis (*Inner Model*) pada Tabel 6 semua pengaruh langsung dapat dinyatakan signifikan karena memiliki *T Statistics* > 1,990. Hubungan variabel tersebut dapat juga diilustrasikan melalui diagram jalur seperti yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3
Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel

Variabel endogen SAKIP dalam Gambar 3 dipengaruhi oleh variabel eksogen pengelolaan keuangan daerah dan SPIP. Pengelolaan keuangan daerah dengan koefisien jalur sebesar 0,474 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap SAKIP dari pada variabel SPIP yang memiliki koefisien jalur 0,391. Variabel endogen *good governance* dalam Gambar 3.2 dipengaruhi oleh variabel eksogen pengelolaan keuangan daerah dan SPIP serta variabel antara SAKIP. SAKIP dengan koefisien jalur sebesar 0,387 memiliki pengaruh yang paling besar terhadap *good governance* dibanding variabel pengelolaan keuangan daerah dan SPIP yang memiliki koefisien jalur masing-masing sebesar 0,258 dan 0,327.

4) Pengaruh Tidak Langsung atau Mediasi

Berdasarkan hasil *indirect effect* pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi hasilnya disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa variabel SAKIP (Y1) signifikan memediasi pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah (X1) dan SPIP (X2) terhadap *good governance* (Y2).

Tabel 7
Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Hubungan Variabel	Original Sampel	Variabel Mediasi	Standard Deviation	T-Statistic	P Value
1	2	3	4	5	6
X1 → Y2	0,183	Y1	0,066	2,793	0,005
X2 → Y2	0,151	Y1	0,069	2,193	0,029

Sumber: Data primer (2017)

5) Pembahasan Hasil Penelitian

(1) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap SAKIP

Pengaruh langsung pengelolaan keuangan daerah terhadap SAKIP memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,474. Hal ini berarti, apabila pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka SAKIP juga semakin baik/meningkat. Dukungan pengelolaan keuangan daerah akan membantu perangkat daerah untuk menunjukkan kinerjanya yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, SAKIP dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Auditya Lucy (2013). Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan

keuangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja. Hal tersebut berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan SKPD maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ratna (2016). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan SAKIP. Artinya untuk memperbaiki SAKIP dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai dengan baik karena semua komponen organisasi bergerak bersama-sama menjalankan program kegiatan secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan entitas sehingga akan mendukung peningkatan kinerja dan penerapan SAKIP.

(2) Pengaruh SPIP Terhadap SAKIP

Pengaruh langsung SPIP terhadap SAKIP memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,391. Hal ini berarti, apabila SPIP semakin baik maka SAKIP juga semakin baik/meningkat. Dukungan SPIP yang baik akan memberikan jaminan bahwa organisasi perangkat daerah telah berkinerja melaksanakan program/kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri Kuswandari (2014). Hasil penelitian menyimpulkan pengawasan

intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan intern memberikan dukungan terhadap responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Semakin bagus pelaksanaan pengawasan intern akan memberikan dampak semakin bagus kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wulandari (2014). Secara parsial variabel SPIP berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Secara simultan variabel SPIP dan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap variabel SAKIP. Artinya semakin baik SPIP dan pelaporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

(3) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance*

Pengaruh langsung pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance* memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,258. Hal ini berarti, apabila pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka *good governance* juga semakin baik/meningkat. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki efek langsung bagi keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dikukan oleh Juliante Farrah Boekorsjom dan Ony Widilestaringtyas (2013). Koefisien *standardized* antara pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* adalah sebesar 0,703 artinya terdapat hubungan kuat antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap

penerapan *good governance*. Karena nilai kontribusi lebih besar dari nol, artinya terjadi hubungan linear positif.

Hasil ini didukung dengan penelitian Ristanti (2014). Hal tersebut menunjukkan variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif serta signifikan secara statistik bagi *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif serta signifikan bagi *good governance*. Suatu organisasi bisa dikatakan berjalan sesuai prinsip *good governance* bila pengelolaan keuangan daerah (dari tahap perencanaan hingga pelaporan) telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

(4) Pengaruh SPIP Terhadap *Good Governance*

Pengaruh langsung SPIP terhadap *good governance* memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,327. Hal ini berarti, apabila SPIP semakin baik maka *good governance* juga semakin baik/meningkat. Perangkat daerah yang melaksanakan SPIP dengan baik memberikan jaminan bahwa tidak terjadi ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menciptakan kepercayaan publik atas tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Ristanti (2014) yang menunjukkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerapan *good governance* pada perangkat daerah. Tujuan sistem pengendalian intern adalah efisiensi dan efektivitas, pengamanan asset keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan ini dilaksanakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Yusniar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada setiap perangkat daerah, maka semakin tinggi pula terciptanya prinsip-prinsip *good governance*.

(5) Pengaruh SAKIP Terhadap *Good Governance*

Pengaruh langsung SAKIP terhadap *good governance* memiliki koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,387. Hal ini berarti, apabila SAKIP semakin baik maka *good governance* juga semakin baik/meningkat. Dukungan SAKIP yang baik memberikan jaminan bahwa organisasi perangkat daerah telah melaksanakan tugas pokok/fungsinya dalam rangka mencapai tujuan/target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja SAKIP organisasi perangkat daerah merupakan pertanggungjawaban instansi untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suherman (2012), Jajang Badrusaman dan Irna Chairunnisa (2012), dan Giantini (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP berpengaruh besar terhadap *good governance*.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Andriani (2015). SAKIP mendorong terwujudnya *good governance* dan bermanfaat meningkatkan

tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta bersih hingga mampu memperlihatkan akuntabilitas publik.

(6) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance* Melalui SAKIP

Hasil penelitian pengaruh tidak langsung pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance* melalui SAKIP menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan. Hal tersebut berarti variabel pengelola keuangan daerah berpengaruh positif serta signifikan secara tidak langsung terhadap *good governance* melalui SAKIP. Apabila pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka *good governance* juga semakin baik/meningkat melalui variabel SAKIP.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ratna (2016) dimana untuk memperbaiki penerapan SAKIP dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelola keuangan sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya pengelola keuangan menjelma menjadi *internal control culture* organisasi pemerintahan di Indonesia guna menciptakan *good governance* dan *clean government*.

(7) Pengaruh SPIP Terhadap *Good Governance* Melalui SAKIP

Hasil penelitian pengaruh tidak langsung SPIP terhadap *good governance* melalui SAKIP menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan. Hal tersebut berarti variabel SPIP berpengaruh positif serta signifikan secara tidak langsung terhadap *good governance* melalui

SAKIP. Apabila SPIP semakin baik maka *good governance* juga semakin baik/meningkat melalui variabel SAKIP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Djiloy (2016), dimana semakin bagus pengawasan intern maka semakin bagus juga kinerja perangkat daerah. Pengawasan intern bermanfaat untuk mendorong terciptanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta *good governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dan SPIP berpengaruh positif serta signifikan terhadap SAKIP Pemerintah Provinsi Bali. Artinya bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka SAKIP juga semakin baik. Semakin baik SPIP maka SAKIP juga semakin baik.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP berpengaruh positif serta signifikan terhadap *good governance* Pemerintah Provinsi Bali. Artinya bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka *good governance* juga semakin baik. Semakin baik SPIP maka *good governance* juga semakin baik. Semakin baik SAKIP maka *good governance* juga semakin baik.
- 3) Pengelolaan keuangan daerah dan SPIP berpengaruh positif serta signifikan secara tidak langsung terhadap *good governance* Pemerintah Provinsi Bali melalui SAKIP. Artinya bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah

dan SAKIP maka *good governance* juga semakin baik. Semakin baik SPIP dan SAKIP maka *good governance* juga semakin baik.

Dengan adanya hubungan positif antara pengelolaan keuangan daerah, SPIP, serta SAKIP terhadap *good governance*, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP sehingga mendorong terwujudnya *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan cara menertibkan proses pencairan anggaran, memastikan perangkat daerah menjadi obyek pengawasan, dan menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. SPIP dapat ditingkatkan dengan cara menyusun standar kompetensi, melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, melakukan analisis risiko, membangun komunikasi berbasis teknologi, dan melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut. SAKIP dapat ditingkatkan dengan cara memastikan penyusunan program/kegiatan mewujudkan tujuan dan sasaran, memberikan dukungan anggaran bagi program/kegiatan prioritas, menyelaraskan indikator, memberikan *reward and punishment*, dan melakukan upaya-upaya pencapaian kinerja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan Pengelola Keuangan mengingat sebanyak 36 orang Pejabat Pengelola Keuangan sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas atau pensiun.

REFERENSI

- Aituarau, Ade Indah Wahyuni Achmad. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung)*.
- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No 2, p:97-189.
- Andriani, Wiwik. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang*, Vol 10, No 2, p:51-60.
- Annajwa. 2012. *Dasar-Dasar Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Tersedia di <http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/2012/12/dasar-dasar-good-governance.html> [diunduh: 1 Pebruari 2017].
- Antara Bali. 2010. *Kemen PAN-Pemprov Bali Kerja Sama Reformasi Birokrasi*. Denpasar: Antara Bali.
- Aprilia, Popi. 2014. *Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)*. Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Tersedia di <http://pacayoatauindak.blogspot.co.id/2014/11/makalah-tata-kelola-kepemerintahan-yang.html> [diunduh: 12 Januari 2017].
- Ariani, Anak Agung Mirah. 2017. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Perencanaan Anggaran, dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Auditya, Lucy, Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Universitas Bengkulu*, Vol 3, p:22-40.
- Azlina, Nur dan Ira Amelia. 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pekanbaru: Universitas Riau. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol 12, No 2, p:32-42.

- Badrusaman, Jajang dan Irna Chairunnisa. 2012. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. 2015. *Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bali Tahun 2014-2018*. Denpasar: Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
- Boekorsjom, Julianet Farrah dan Ony Widilestaringtyas. 2013. *Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada BPKAD Provinsi Papua*. Jawa Barat: Universitas Komputer Indonesia.
- Djiloy, Novita Lerly. 2016. Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Sulawesi Tengah: Universitas Tadulako. *E-Jurnal Katalogis*, Vol 4, No 6, p:70-82.
- Eko, Sutoro dan Dwipayana, A. A. G. N. Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Fadilah, Sri. 2011. Analisis Penerapan Good Governance Dilihat Dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management. Bandung: Universitas Islam Bandung. *Jurnal Proisiding SNaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol 2, No 1, p:387-400.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelin Metode Alternative dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giantini, Dini. 2014. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Suatu Studi Pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Wilayah Bandung)*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Harahap, Dumasari. 2012. "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance dan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" (*disertasi*). Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Indrawati, Kristina Kusuma. 2016. "Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo)" (*tesis*). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Isomudin. 2015. *Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia*. Tersedia di <https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaraan-pendidikan-di-indonesia/> [diunduh: 23 Mei 2017].
- Izzudin. 2009. *Peningkatan Kinerja Pemda Dalam Mewujudkan Good Governance*. Tersedia di <https://izzuddincenter.wordpress.com/peningkatan-kinerja-pemda-dalam-mewujudkan-good-governance/> [diunduh: 15 Pebruari 2017].
- Kuswandari, Astri. 2014. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung)*. Jawa Barat: Universitas Komputer Indonesia.
- Laida, Eva. 2009. "Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Good Governance (Studi Kasus Pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian)" (*tesis*). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2011. *Pedoman Evaluasi AKIP*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Masuki. 2010. *Kemenpan-Pemprov Bali Kerja Sama Reformasi Birokrasi*. Tersedia di <http://bali.antaranews.com/berita/3709/kemen-pan-pemprov-bali-kerja-sama-reformasi-birokrasi> [diunduh: 15 Pebruari 2017].
- Mayasari, Riana. 2016. "Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan" (*tesis*). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan*

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pemerintah Provinsi Bali. 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.*

Pemerintah Provinsi Bali. 2016. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.*

Putri, Alvianita Gunawan. 2016. "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes" (*tesis*). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Presiden Republik Indonesia. 1999. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Primadona, Almanda. 2011. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Jawa Barat: Universitas Komputer Indonesia.
- Ratna, Ikhwani dan Hidayati Nasrah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No 1, p:56-79.
- Ratnawati, Juli dan Petrus Arnold C. W. 2011. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro. *Jurnal Dian*, Vol 11, No 2, p:182-191.
- Riadi, Muchlisin. 2012. *Teori Akuntabilitas*. Tersedia di <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html> [diunduh: 16 Januari 2017].
- Ristanti, Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati, Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2, No 1.
- Rizaldi, Witman. *Pelaksanaan Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi*. Sumatera Utara: Universitas Bung Hatta.
- Rosyada, Ayu Amrina. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4, No 1, p:102-114.
- Santoso, Eko. 2011. "Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi" (*tesis*). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik. 2007. *Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Bappenas.

- Selamat, Melani Dwiyanti. 2011. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*.
- Sofyani, Hafiez dan Rusdi Akbar. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 10, No 2, p:184-205.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Suherman, Indah Syukarti. 2012. "Pengaruh Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Kualitas Good Governance" (*tugas akhir*). Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Wardhana, Gede Ary Surya. 2015. "Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Widiari, Putu Ayu, I Dewa Nyoman Badera, dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2016. Peran Good Government Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Denpasar: Universitas Udayana. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5.8 (2016), p:2353-2380.
- Wiguna, Made Budi Sastra, Gede Adi Yuniartha, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3, No 1.
- Wulansari, Pratiwi. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung)*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Yusmalizar. 2014. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.

Yusniar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 5, No 2, p:100-115.

Yusuf Izudin. 2013. *Teori Administrasi Negara*. Tersedia di <http://izudinyusuf.blogspot.co.id/2013/03/teori-administrasi-negara.html> [diunduh: 16 Januari 2017].

Zeyn, Elvira. 2010. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Bandung; Universitas Pasundan. *Jurnal Trikonomika*, Vol 10, No 1, p:52-62.